

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia ialah senantiasa memajukan kesejahteraan umum, seperti yang telah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia haruslah menjalankan roda pemerintahan dengan baik serta melaksanakan pembangunan di segala bidang yang dapat memberikan fasilitas serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat luas.

Perwujudan dalam kesejahteraan rakyat ini, pemerintah pusat melakukan salah satu hal yakni menjalankan sistem desentralisasi, dimana pemerintah pusat telah melimpahkan kekuasaan kepada setiap daerah otonom untuk mengatur urusannya sendiri. Hal ini seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai suatu pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan dalam rangka mengatur daerahnya sendiri, dengan begitu kesejahteraan rakyat pun diharap merata ke seluruh masyarakat Indonesia.

Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah ini artinya pemerintah daerah selaku daerah otonom memiliki hak untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, baik dalam hal membuat kebijakan daerah serta keuangan daerah yang

dimilikinya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa keuangan daerah ialah kewenangan dan keharusan daerah yang sejatinya bisa dinilai dengan uang serta segala hal yang menjadi milik daerah tersebut dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah.

Keuangan menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, karena fungsi dari pemerintah daerah tidak bisa berjalan dengan maksimal tanpa biaya yang memadai untuk memberi pelayanan yang optimal pada masyarakat dan melangsungkan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintahan daerah haruslah mengelola keuangannya dengan sebaik mungkin untuk mengetahui kapabilitas yang dimiliki daerah tersebut dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan begitu, perlu dirancang suatu perencanaan dalam melaksanakan keuangan daerah, agar program serta kegiatan yang kelak dilakukan dapat terselenggara dan terkelola dengan baik. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selama satu periode haruslah memanfaatkan dengan maksimal anggaran yang telah dianggarkan oleh pemerintahan daerah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut, dikarenakan suatu daerah dikatakan menjadi daerah yang berhasil tumbuh atau tidak dilihat dari cara daerah tersebut dalam melakukan pengelolaan keuangan yang dimilikinya. Apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat pun akan mudah untuk dicapai.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah yakni berkaitan dengan kinerja keuangan, karena kinerja keuangan inilah yang digunakan suatu instansi atau lembaga dalam menilai keuangan yang dimilikinya telah berhasil atau belum dalam penggunaannya untuk mencapai maksud atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam melakukan pengelolaan dana desentralisasi haruslah ekonomis, efektif, efisien, transparan, serta bertanggung jawab, dimana salah satunya dilakukan menggunakan *value for money*.

Value for money ialah salah satu konsep dalam melihat kinerja keuangan, karena pengukuran kinerja keuangan digunakan dalam menilai apakah realisasi dalam penggunaan keuangan untuk program atau kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan rencana atau tidak, serta utamanya guna menilai apakah keuangan tersebut keberhasilannya sesuai dengan target dalam perencanaan. *Value for money* sendiri terdiri dari dua indikator yaitu alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) dan kualitas pelayanan (efektivitas). Jadi, *value for money* dalam mengukur kinerja keuangan artinya penilaian disini ditekankan kepada aspek 3E, yakni ekonomis, efisiensi, serta efektivitas. Pengukuran kinerja keuangan memang sangatlah penting untuk menjadi tolok ukur penilaian akuntabilitas suatu organisasi atau instansi dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih optimal guna mencapai kesejahteraan rakyat. Sejatinya adanya pengukuran kinerja keuangan ini secara menyeluruh yang meliputi indikator suatu sumber daya yang dipergunakan, keluaran atau hasil yang bermanfaat untuk

masyarakat, dan memperhatikan dampak langsung serta tidak langsung dari setiap program yang dilaksanakan dapat membentuk akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan laman web *banten.bps.go.id* , Kota Tangerang Selatan menempati peringkat pertama pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini ditetapkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990, dimana digunakan untuk mengukur suatu keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Salah satu dimensi yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini ialah pendidikan. Pendidikan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dimana dengan adanya pendidikan ini diharap mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, karena melalui pendidikan ini lah yang dapat membuat pertumbuhan ekonomi meningkat apabila tersedianya sumber daya manusia yang handal dan kompeten.

Selalu organisasi sektor publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan pada hakikatnya berfungsi dalam memberikan pelayanan, pembinaan, serta pengendalian segala urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan penguatan kebudayaan daerah setempat. Sebagai organisasi sektor publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan berperan penting dalam mewujudkan pendidikan dan mengembangkan kebudayaan yang berkualitas di Kota Tangerang Selatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan dalam mencapai tujuan dan target yang telah tertera tersebut, kemudian menyusun program atau kegiatan dalam menjalankan fungsinya selaku organisasi sektor publik yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan menggunakan keuangan yang dimiliki untuk pelaksanaan program atau kegiatan tersebut tentunya yang ditujukan untuk kepentingan rakyat selaku penerima layanan publik.

Salah satu pelaksanaan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan yang ada di lapangan sebagaimana yang telah dipublikasikan dalam laman web *megapolitan.okezone.com* pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat bangunan sekolah dasar yang tidak layak pakai di Kota Tangerang Selatan, padahal telah menggunakan dana yang cukup besar dalam pembangunannya yakni sebesar 15 miliar rupiah. Sekolah dasar tersebut ialah SDN Jelupang 1, Kecamatan Serpong Utara. Lalu, hal serupa terjadi pada tahun 2019, dimana ditemukan kembali sekolah dasar yakni SDN Rawa Buntu 3 Kota Tangerang Selatan bangunannya sudah tidak memadai untuk digunakan, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam laman web *metro.sindonews.com* dan *megapolitan.okezone.com*. Berdasarkan berita yang telah dipublikasikan tersebut dapat terlihat bahwasanya dalam menggunakan keuangan untuk menjalankan program yang dimiliki, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan belum optimal karena terjadinya permasalahan yang sama di tahun yang berbeda, artinya kurangnya evaluasi lanjut pada permasalahan tersebut. Hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Tangerang Selatan untuk melihat penggunaan keuangannya sudah berjalan dengan baik atau justru sebaliknya.

Bagian keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan memberikan informasi awal terkait penilaian kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan hanya sebatas komparasi antara anggaran belanja dengan realisasinya saja, dimana anggaran yang dimiliki sudah berhasil terealisasi karena tidak melebihi anggaran yang tersedia. Tidak hanya itu, bagian keuangan instansi tersebut berkata bahwa kinerja keuangannya sudah sangat baik karena anggaran yang digunakan dalam menjalankan fungsinya telah mencapai minimal 80%.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Pertama, dimana ditemukannya realisasi anggaran belanja daerah yang masih belum mencapai 100% anggaran yang ada. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tahun 2017	639.091.525.614,46	590.139.110.627,00	92,34
Tahun 2018	619.897.892.834,00	591.142.907.289,00	95,36
Tahun 2019	631.408.449.466,27	599.790.178.186,00	94,99

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Terlihat pada data di atas bahwa realisasi belanja daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tiap tahunnya kian meningkat, namun peningkatan tersebut ditemukan masih terdapat angka yang belum mencapai presentase realisasi 95% bahkan 100% sehingga dikatakan belum maksimal, sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02 Tahun 2015 berkenaan dengan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga bahwa presentase penyerapan anggaran suatu instansi pemerintah dalam satu periode minimal mencapai angka 95%. Berlandaskan pada wawancara yang dilakukan, hal tersebut disebabkan adanya sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan yang belum seluruhnya memahami dengan baik proses pengelolaan anggaran serta perencanaan awal yang belum terlaksana dengan baik.

Permasalahan kedua yang ditemukan, peningkatan dalam realisasi belanja daerah tersebut tidak terjadi pula pada belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, dimana realisasi belanja langsung yang dimiliki cenderung mengalami fluktuatif serta ditemukannya selisih negatif dalam realisasinya. Tertera pada tabel di bawah untuk mengetahui secara jelasnya.

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2019

Tahun/Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Tahun 2017			
Belanja Pegawai	81.597.813.210,00	90.072.650.284,00	(8.474.837.074,00)
Belanja Barang dan Jasa	126.712.489.281,00	103.853.017.263,00	22.859.472.018,00
Belanja Modal	92.077.697.126,00	84.215.455.367,00	7.862.241.759,00
Total	300.387.999.617,00	278.141.122.914,00	39.196.550.851,00
Tahun 2018			
Belanja Pegawai	109.843.191.500,00	106.053.509.200,00	3.789.682.300,00
Belanja Barang dan Jasa	106.846.988.181,00	99.185.359.835,00	7.661.628.346,00
Belanja Modal	49.650.185.319,00	44.421.231.887,00	5.228.953.432,00
Total	266.340.365.000,00	249.660.100.922,00	16.680.264.078,00
Tahun 2019			
Belanja Pegawai	124.073.886.202,00	121.114.920.450,00	2.958.965.752,00
Belanja Barang dan Jasa	116.175.212.249,27	108.979.481.808,00	7.195.730.441,27
Belanja Modal	30.829.809.350,00	26.071.513.447,00	4.758.295.903,00
Total	271.078.907.801,27	256.165.915.705,00	14.912.992.096,27

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Data yang tertera di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja pegawai mengalami selisih yang negatif dikarenakan realisasi yang lebih besar daripada anggaran yang tersedia. Pun dalam realisasinya pada tahun 2017-2019 mengalami fluktuatif serta dapat dikatakan belum maksimal karena masih terdapat anggaran yang belum digunakan minimal 95% sampai 100%.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan pada kegiatan wawancara, hal tersebut dapat terjadi karena adanya harga barang yang tidak menentu tiap tahunnya serta kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan belum maksimal dimana

banyak penyedia barang atau produk yang tidak bersedia untuk menyediakan barang atau produknya karena keterbatasan waktu.

Permasalahan yang ketiga yaitu dalam realisasi program yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan belum terlaksana secara maksimal, karena ditemukannya presentase di bawah angka 80% dalam realisasi program tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh bidang keuangan instansi terkait, dimana sebelumnya dikatakan bahwa kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sudah sangat baik karena mencapai angka 80% dalam perealisasiannya. Tidak hanya itu, masih terdapat program yang realisasi nya belum mencapai minimal 95% bahkan 100% sesuai dengan PMK Nomor 258/PMK.02 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 1.3

Anggaran dan Realisasi Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2019

Tahun	Program	Anggaran	Realisasi	%	
				Rp	Fisik
2017	1. Program Non Urusan Setiap SKPD	Rp. 50.243.278.292	Rp. 43.265.550.019	86,11	87,44
	2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Dahun	Rp. 142.881.154.500	Rp. 88.051.961.572	61,63	62,2
	3. Program Pendidikan Menengah	Rp. 63.633.504.000	Rp. 36.398.282.473	57,2	54,58
	4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	Rp. 3.184.697.000	Rp. 2.781268.900	87,33	90,34

	Kependidikan				
	5. Pendidikan Formal dan Non Formal	Rp. 5.571.526.800	Rp. 4.606.266.600	82,68	88,11
2018	1. Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 129.342.250.707	Rp. 120.204.620.580	92,94	96,36
	2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 64.669.030.553	Rp. 62.153.263.395	96,11	99,71
	3. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 54.409.606.940	Rp. 51.763.007.140	95,14	98,85
	4. PAUD dan Pendidikan Non Formal	Rp. 3.026.432.000	Rp. 2.568.923.000	84,88	91,09
	5. Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 2.830.935.000	Rp. 2.596.634.500	91,72	95,10
	6. Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 652.333.400	Rp. 273.818.900	41,98	59,21
	7. Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 476.300.000	Rp. 356.319.600	74,81	77,24
	8. Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 280.000.000	Rp. 277.500.000	99,11	100
	9. Pengembangan sistem manajemen sumber daya aparatur	Rp. 443.013.400	Rp. 334.687.800	75,55	77,79
	10. Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Rp. 10.210.463.000	Rp. 9.131.326.007	89,43	90,89
2019	1. Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 118.663.228.981	Rp. 112.491.960.455	94,80	97,30
	2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 52.348.668.572	Rp. 47.267.640.693	90,29	93,29
	3. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rp. 79.650.000.000	Rp. 78.341.649.830	98,36	100,86
	4. PAUD dan pendidikan non formal	Rp. 6.091.400.000	Rp. 5.025.151.032	82,50	85,50
	5. Pengembangan nilai budaya	Rp. 2.550.000.000	Rp. 2.414.190.200	94,67	97,37
	6. Pengembangan data dan informasi	Rp. 557.496.700	Rp. 493.448.750	88,51	91,51
	7. Perencanaan pembangunan daerah	Rp. 565.207.300	Rp. 455.491.550	80,59	84,09

8. Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 300.000.000	Rp. 271.648.500	90,55	93,05
9. Pengembangan sistem manajemen sumber daya aparatur	Rp. 267.500.000	Rp. 250.906.500	93,80	95,80
10. Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Rp. 10.085.406.248	Rp. 9.153.828.196	90,76	93,76

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, diketahui bahwa program yang dilaksanakan belum terealisasi dengan maksimal dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik, kurangnya partisipasi sumber daya manusia yang menjadi sasaran, serta pelaksanaan perencanaannya kurang maksimal.

Melihat dari penjelasan di atas semakin meyakinkan penulis untuk menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebagai lokus melakukan penelitian. Adapun pertimbangan penulis melakukan penelitian yang berkenaan dengan kinerja keuangan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, yaitu sebagai berikut: (1) Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, baik dalam belanja daerah, belanja langsung, serta program yang dilaksanakan belum optimal mencapai 100%; (2) Dalam realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan cenderung mengalami fluktuatif serta ditemukannya selisih negatif dalam belanja pegawai tahun 2017; (3) Terdapat realisasi anggaran yang belum mencapai angka 80% dalam program yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan,

dimana hal tersebut berbeda dengan pernyataan awal yang diberikan bahwa anggaran yang dimiliki telah digunakan dengan sangat baik sehingga telah mencapai minimal 80%; dan (4) Pada tahun 2017-2019 masih terdapat realisasi anggaran yang belum mencapai anggaran yang dimiliki, dimana penyerapan anggaran tersebut dapat memberikan dua kemungkinan, yakni pertama dapat menunjukkan bahwa realisasi dari anggaran tersebut telah ekonomis, efisien, ataupun efektif sesuai dengan kriteria yang ada. Kedua, adanya selisih kurang tersebut bisa saja menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada perencanaan anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Penulis pun merasa perlu untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan kinerja keuangan yang dimiliki, karena telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02 Tahun 2015 yang berkenaan dengan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga bahwa presentase penyerapan anggaran pada instansi pemerintah dalam satu periode minimal mencapai 95% dan apabila penyerapan anggaran tersebut kurang dari 95%, maka satuan kerja tersebut akan diberikan sanksi. Berdasarkan hal tersebut, melalui penelitian yang dilakukan lebih lanjut, penulis dapat mengetahui apakah kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan ini telah mencapai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atau justru sebaliknya.

Pemaparan mengenai *value for money* serta permasalahan yang ditemukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan ini meyakinkan penulis bahwa kinerja keuangan ini menarik untuk dijadikan penelitian dengan

menilainya menggunakan konsep *value for money*, dimana selaku organisasi sektor publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan perlu melakukan pengukuran kinerja keuangan dengan konsep *value for money* untuk melihat apakah penggunaan keuangannya sudah ekonomi, efisien, dan efektif atau belum.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka kinerja keuangan ini menjadi hal yang penting dalam suatu organisasi guna melihat keberhasilan dalam penggunaan keuangannya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “KINERJA KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017-2019 DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*”.

B. Identifikasi Masalah

Bersandarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan belum optimal.
2. Realisasi belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuatif dan adanya selisih negatif pada realisasi belanja pegawai tahun 2017.
3. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017-2019 belum terlaksana secara

optimal serta dalam realisasinya belum seluruhnya mencapai 80% sesuai dengan pernyataan awal yang diberikan.

4. Perencanaan yang belum optimal menyebabkan adanya penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Melihat identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator alokasi biaya yang menekankan pada aspek ekonomi dan efisiensi pada kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tahun 2017-2019?
2. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator kualitas pelayanan yang menekankan pada aspek efektivitas pada kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tahun 2017-2019?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan pertama yakni untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator alokasi biaya yang menekankan pada aspek ekonomi dan efisiensi pada kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tahun 2017-2019.

2. Tujuan kedua yakni untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator kualitas pelayanan yang menekankan pada aspek efektivitas pada kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tahun 2017-2019.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diraih dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini dalam kegunaan teoritis yakni berguna sebagai penambahan serta pengembangan keilmuan atau wawasan penulis dan pembaca dalam kajian Administrasi Publik, yang berkaitan dengan konsentrasi Keuangan Sektor Publik, utamanya pada kajian kinerja keuangan.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan ini diharap dapat mengembangkan pemahaman serta pengetahuan penulis mengenai kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *value for money*, terutama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

2) Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharap dapat bermanfaat untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan guna menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam hal yang berkaitan dengan kinerja

keuangan yang dimiliki agar dapat lebih mengoptimalkannya pada tahun berikutnya.

3) Bagi Peneliti Lain

Adanya penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber informasi serta rujukan pada penelitian yang dilakukan selanjutnya secara lebih luas dan mendalam, utamanya pada bidang yang sama agar dapat dikembangkan dalam hal-hal berkenaan dengan kinerja keuangan.

F. Kerangka Pemikiran

Fokus pada penelitian ini ialah kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan konsep *value for money*. Kinerja keuangan merupakan hasil dari penggunaan keuangan yang dimiliki oleh organisasi sektor publik, dimana dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu organisasi dalam mengelola keuangan yang dimiliki untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat.

Adapun Irham Fahmi mengatakan kinerja keuangan yaitu kegiatan analisis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk melihat pelaksanaan keuangan yang dimiliki telah terlaksana dengan baik atau benar dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama guna mencapai tujuan awal yang dibuat (Setiawan, 2017).

Berkaitan dengan pemerintah daerah, Sumarjo (dalam Wahyudin & Sugianal, 2017:52) mengartikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat”.

Beberapa pengertian di atas menunjukkan kinerja keuangan merupakan salah satu hal penting yang digunakan dalam menentukan penilaian anggaran belanja organisasi sektor publik, apakah dalam penggunaannya telah berjalan dengan baik atau justru sebaliknya. Oleh sebab itu, adanya pengukuran dalam kinerja keuangan ini sifatnya perlu untuk dilaksanakan, karena keuangan sendiri dapat digunakan untuk melihat maksimalnya penggunaan anggaran yang dimiliki dalam memberikan pelayanan guna menyejahterakan rakyat untuk mencapai akuntabilitas publik.

Salah satu cara untuk mengetahui jalannya kinerja keuangan telah baik atau belum yakni dengan menerapkan penggunaan konsep *value for money*. *Value for money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja keuangan yang ada pada organisasi pemerintahan berdasarkan hasil dari penggunaan anggaran yang ditetapkan. Menurut Mahmudi (2015:83) *value for money* merupakan sebuah penghargaan atas nilai mata uang yang dimiliki. Artinya, angka dari setiap rupiah haruslah dijunjung dengan layak serta digunakan dengan baik dan benar. *Value for money* juga merupakan sebuah kunci dalam mengukur kinerja sektor publik, dimana kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan keuangan saja, tetapi juga nonkeuangan (Mahmudi 2015:89-90).

Mardiasmo juga menegaskan bahwa *value for money* ini melihat penggunaan uang publik di suatu organisasi sektor publik ini haruslah merata, tidak ada yang

lebih maupun kurang. *Value for money* juga ialah sebuah konsep pengelolaan pada organisasi sektor publik yang melandaskan pada tiga unsur yakni ekonomis, efektivitas, dan efisiensi (Mardiasmo 2018:5-6).

Penjelasan di atas tersebut selaras dengan permasalahan yang ditemukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, dimana masih adanya penggunaan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan yang belum optimal karena belum mencapai presentase realisasi 95% sampai 100% serta ditemukannya realisasi yang melebihi pagu anggaran pada akun belanja langsung tahun 2017. Oleh sebab itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori *value for money* yang dikemukakan oleh Mardiasmo, dimana Mardiasmo membagi *value for money* menjadi dua indikator sebagai berikut (2018:164).

- 1) Alokasi Biaya (ekonomi dan efisiensi).
- 2) Kualitas Pelayanan (efektivitas).

Berdasarkan indikator *value for money* ini dapat melihat apakah kinerja keuangan yang dimiliki telah ekonomis, efisien, dan efektif. Artinya *value for money* menjadi suatu metode yang tepat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan melihat dari penggunaan keuangannya, dimana kelak terlihat apakah penggunaannya tersebut sudah dialokasikan dengan baik atau belum.

Bersandarkan pada penjelasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa untuk mencapai akuntabilitas publik guna menyejahterakan masyarakat perlu dilakukannya penilaian kinerja keuangan dengan konsep *value for money* untuk

mengetahui pemanfaatan anggaran publik tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum serta sudah ekonomi, efisien, dan efektif atau belum, baik dalam pengalokasian biaya maupun kualitas pelayanan yang dihasilkan. Dengan demikian, penulis menyusun kerangka pemikirannya sebagai berikut.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

